

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL
MENURUT PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM NOMOR 49 TAHUN 2025
DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Disusun oleh:

Syakira Syafa Tsabita

2110113101

Program Kekhususan (PK) : Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing:

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Andalusia, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Syakira Syafa Tsabita	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Kebumen/20 Januari 2003 b. Nama Orangtua : Tri Widyanto c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata e. No. BP : 2110113101	f. Tanggal Lulus : 11 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 5 Tahun i. IPK : 3,80 j. Alamat : Jalan Serayu No. 1, Kec. Gombong, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah	

**PELAKSANAAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL MENURUT
PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM NOMOR 49 TAHUN 2025 DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**

(Syakira Syafa Tsabita, 2110113101, Hukum Perdata (PK-I) Fak. Hukum Universitas Andalas, 88 Hlm, 2026)

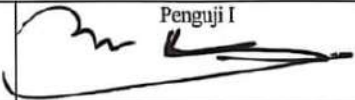
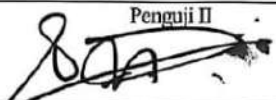
ABSTRAK

Perubahan data perseroan merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan Perseroan Terbatas yang wajib dilakukan melalui mekanisme administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perubahan data perseroan saat ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berbasis elektronik yang disertai dengan proses verifikasi substantif. Namun, pelaksanaan verifikasi tersebut sering kali menimbulkan hambatan, seperti keterlambatan proses hingga pemblokiran permohonan. Permasalahan tersebut berdampak pada kepastian hukum terhadap keberlakuan perubahan data perseroan meskipun akta perubahan telah dibuat secara sah oleh notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan verifikasi pada perubahan data perseroan persekutuan modal yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 dalam menjamin kepastian hukum akta perubahan data perseroan terbatas?; dan (2) Bagaimana konsekuensi yuridis kepada para pihak terhadap akta perubahan yang belum diverifikasi oleh Kementerian? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris Dr. H. Titi Sulistyowati, S.H., M.H. serta perwakilan PT Adikarya Putra Cisadane terkait pelaksanaan perubahan data perseroan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam proses verifikasi berpengaruh terhadap kepastian hukum mengenai keberlakuan perubahan perseroan, khususnya berkaitan dengan pengakuan administratif dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga. Selain itu, akta perubahan yang belum memperoleh verifikasi menimbulkan konsekuensi yuridis bagi notaris berupa belum terselesaikannya proses pelayanan hukum dalam pengajuan perubahan data perseroan, sedangkan bagi perseroan menyebabkan perubahan data belum dapat diberlakukan secara optimal dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan kepastian hukum secara optimal bagi para pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Verifikasi Substantif, Kepastian Hukum, Perubahan Data Perseroan, Akta Perubahan, Sistem Administrasi Badan Hukum.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 11 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.	Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Syakira Syafa Tsabita	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Kebumen/20 th January 2003 b. Parents' Name : Tri Widyanto c. Faculty : Law d. Concentration : Civil Law e. Student ID : 2110113101	f. Graduation Date : 11 th August 2026 g. Pass Predicate : Very Satisfactory h. Length of Study : 5 th years i. GPA : 3,80 j. Address : Jalan Serayu No. 1, Kec. Gombong, Kab. Kebumen, Prov. Jaa Tengah	

IMPLEMENTATION OF CHANGES TO CAPITAL PARTNERSHIP COMPANY DATA ACCORDING TO MINISTRY OF LAW REGULATION NUMBER 49 OF 2025 IN ENSURING LEGAL CERTAINTY
(Syakira Syafa Tsabita, 2110113101, Civil Law (CP-I), Faculty of Law Andalas University, 88 Pages, 2026)

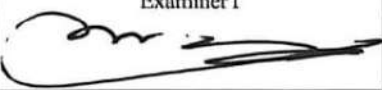
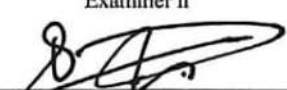
ABSTRACT

Changes to company data are a crucial aspect of the dynamics of a Limited Liability Company's operations, requiring execution via administrative mechanisms in accordance with statutory regulations. In practice, such changes are currently processed through the electronic Legal Entity Administration System (SABH), which entails a substantive verification process. However, this verification process often encounters obstacles, ranging from processing delays to the blocking of applications. These issues impact the legal certainty regarding the validity of the data changes, even when the deed of amendment has been lawfully executed by a notary. The research questions addressed are: (1) How does the verification process for data changes in capital-based companies—as regulated by Ministry of Law Regulation Number 49 of 2025—ensure legal certainty for the deed of amendment?; and (2) What are the legal consequences for the parties involved regarding a deed of amendment that has not yet been verified by the Ministry? The study employs an empirical-juridical research method with a statutory approach. Data were gathered through literature reviews and interviews with notary Dr. H. Titi Sulistyowati, S.H., M.H., and representatives from PT Adikarya Putra Cisadane regarding the implementation of company data changes. The findings indicate that obstacles in the verification process affect legal certainty concerning the validity of the changes, particularly regarding administrative recognition and enforceability against third parties. Furthermore, unverified deeds of amendment entail legal consequences: for the notary, the legal service process for the application remains incomplete; for the company, the data changes cannot be fully implemented or enforced in legal relationships with third parties. Consequently, the verification process stipulated in Ministry of Law Regulation Number 49 of 2025 requires refinement to ensure optimal legal certainty for all interested parties.

Keywords: Limited Liability Company, Substantive Verification, Legal Certainty, Company Data Changes, Deed of Amendment, Legal Entity Administration System.

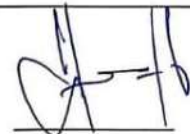
This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 11th 2026

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Name	Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.	Dr. Wisnar Syam, S.H., M.Hum.

Acquainted,

Head of the Department of State Civil Law: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: